



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementerian/lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan Tahun 2025 memuat target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Seruyan.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Seruyan pada tahun 2025 yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pencapaian dari target kinerja organisasi yang selanjutnya dilaporkan atas capaian tersebut kedalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) untuk menilai keberhasilan dari organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk penyempurnaan penyusunan rencana aksi kinerja yang akan datang. Kami berharap mudah – mudahan RAK ini dapat memberikan kontribusi

yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dalam upaya membangun pemerintah Kabupaten Seruyan yang lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 tersebut untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan baik.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan,

ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Gambaran Umum Organisasi	7
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II RENCANA AKSI KINERJA	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II	24
2.4 Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025	26
BAB III PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesejahteraan sosial berbangsa dan bernegara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial kerja cenderung meningkat, seiring dengan derasny arus globalisasi yang melanda dunia termasuk indonesia, sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan professional seiring dengan hak-haknya selaku warga negara. oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, sesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya. Hal ini semata – mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dinas sosial kabupaten seruyan mempunyai kometmen dan tekad yangn kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

- Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.
32. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan suatu rumusan yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome).

Secara umum maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun 2025 yakni sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025. Adapun tujuan secara khusus Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.
2. Meningkatnya Kualitas sumber daya aparatur.
3. Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

5. Terwujutnya perlindungan dan Jaminan sosial serta kesetia kawan sosial masyarakat.
6. Terwujutnya peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
7. Terlestarikan, tertanam dan teramalkannya nilai – nilai kepahlwanan, keperintisan dan kejuanagan.
8. Terwujudnya penanganan Pemerlu Pelayan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
9. Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial, baik dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka percepatan pencapaian target SPM.
10. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan dalam rangka penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

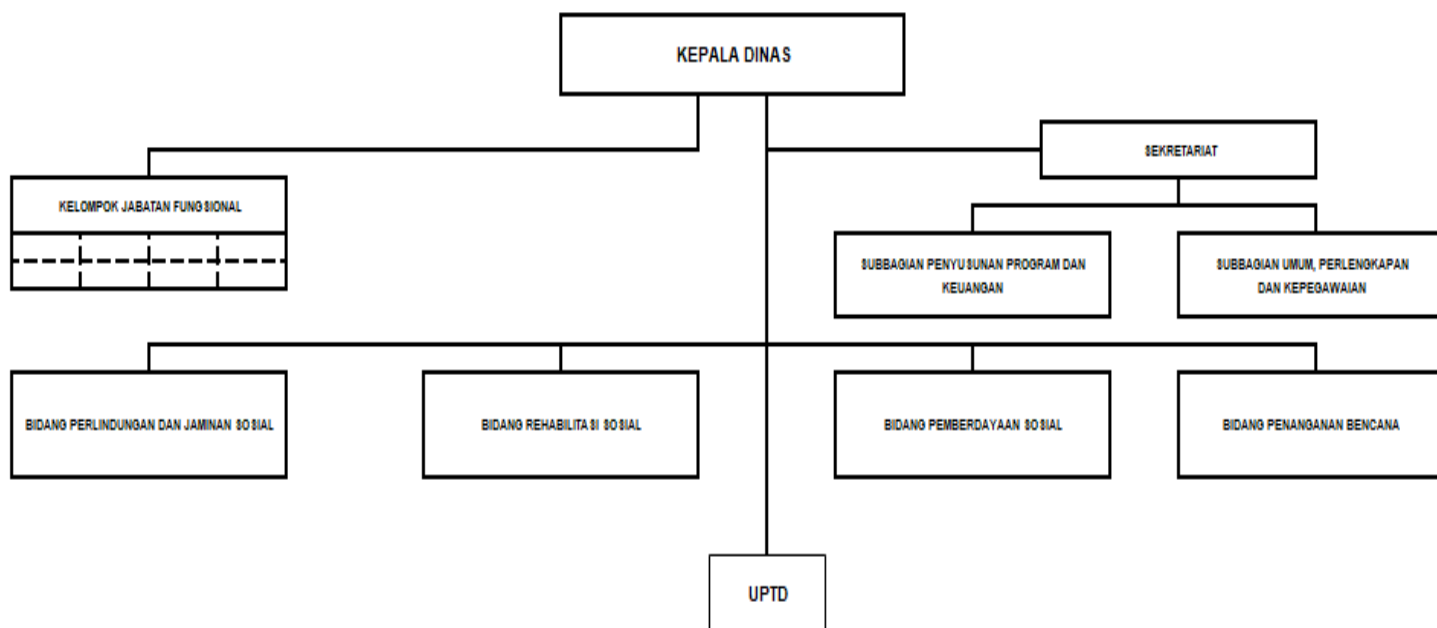
- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional,
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
- i. UPTD.

Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2025

NO URUT	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	6	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6

24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11
48	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
JUMLAH		24	21	

Berdasarkan data dan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Seruyan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (10,71%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (42,86%), D3 sebanyak 2 orang (7,14%), SLTA sebanyak 3 orang (39,29%).

Komposisi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki seimbang, begitu pula untuk jabatan struktural hampir seimbang komposisinya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II dan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

BAB III PENUTUP

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) Tahun, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode 2025-2026, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	B	B	B

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam menetapkan penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja / Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

TUJUAN	Indikator Tujuan	Rumusan	Target	SASARAN	Indikator Sasaran	Rumusan	2025	Indikator Program	Rumusan	2025	Indikator Kegiatan	Rumusan	2025	Indikator Sub Kegiatan	Rumusan	Target	Anggaran			
Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB untuk Dinas Sosial	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Σ Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan / Σ Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar tahun n X 100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Σ Capaian Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan yang tersedia / Σ Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan tahun n X 100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	Σ Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	25 Orang / bulan	4.439.749.156
											100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Σ Capaian Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan yang tersedia / Σ Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan tahun n X 100%	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan tahun n	Σ Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan tahun n	63 Paket	37.600.000
											100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mem peroleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian / Σ Pegawai yang bekerja pada unit kerja Perangkat Daerah	Σ Pegawai yang Mem peroleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Σ Pegawai yang bekerja pada unit kerja Perangkat Daerah tahun n X 100%	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tahun n	Σ Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tahun n	10 Orang	21.031.000
															100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan tahun n	Σ Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan tahun n	15 Orang	49.983.000
											100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Σ Capaian Jenis Pelayanan Administrasi Umum yang tersedia / Σ Jenis Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun n X 100%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	Σ Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	2 Paket	8.001.400
															100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n	Σ Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n	3 Paket	84.366.600

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ΣBarang yang dipelihara / ΣBMD yang memerlukan pemeliharaan pada Perangkat Daerah tahun n X 100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ΣKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tahun n	10 Unit	55.117.500	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ΣKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n	4 Unit	56.752.500		
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(ΣPPKS Tahun N-1 - ΣPPKS Tahun N)/ΣPPKS Tahun N-1) X 100%	Tahun 2024 :0,01; Tahun 2025 : 0,015 ; Tahun 2026 : 0,02	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	ΣPPKS yang mendapat penanganan / ΣPPKS di Kabupaten Seruyan tahun n X 100%	100%	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1. ΣPenyelenggara PUB atau UGB yang tertib izin sumbangan / ΣPenyelenggara PUB atau UGB di Kabupaten Seruyan tahun n x 100%2. ΣPemberdayaan Sosial terhadap PSKS yang dilaksanakan /ΣPemberdayaan Sosial yang seharusnya dilaksanakan dalam 1 tahun x 100%	100%100%	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	ΣPenerbitan Rekomendasi Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang / ΣUsulan Rekomendasi Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang tahun n x 100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Σ Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang tahun n	45 Dokumen	29.132.000
												Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang berkembang	ΣPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditingkatkan /ΣPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan tahun n X 100%	100%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Σ Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota tahun n	10 Orang	26.952.100
												Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	ΣTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota tahun n	10 Orang	30.595.000				

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

								si Sosial	<p>Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial sesuai SPM</p> <p>2.Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p>	<p>Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang dilaksanakan dalam 1 tahun /ΣLayanan Rehabilitasi Sosial yang harus dilaksanakan sesuai SPM tahun n X 100%</p> <p>2. ΣLayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dilaksanakan dalam 1 tahun /ΣLayanan Rehabilitasi Sosial yang harus dilaksanakan tahun n X 100%</p>	100%	<p>Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p>	<p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial</p> <p>2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti</p> <p>3.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti</p> <p>4.Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	<p>Disabilitas Terlantar yang terlayani kebutuhan dasarnya / ΣPenyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Kabupaten Seruyan tahun n X 100%</p> <p>2. ΣAnak Terlantar yang terlayani kebutuhan dasarnya / ΣAnak Terlantar di Luar Panti Sosial Kabupaten Seruyan tahun n X 100%</p> <p>3. ΣLanjut Usia Terlantar yang terlayani kebutuhan dasarnya / Σ Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Kabupaten Seruyan tahun n X 100%</p> <p>4. ΣGelandangan Pengemis yang terlayani kebutuhan dasarnya / ΣGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kabupaten Seruyan tahun n X 100%</p>	100%	Permakanan	Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Orang	47.215.000
															100%	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Σ Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	25 Orang	3.696.500
															100%	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Σ Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	20 Orang	51.820.000
															100%	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Σ Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	23 Orang	65.619.000
															100%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Σ Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	5 Orang	15.613.000
															100%	Pemberian	Jumlah	Σ Peserta	10	

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) PEJABAT ESSELON II

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) dan memberikan tuntutan lebih meningkatkan pemerintahan yang berdayaguna bersih dan bertanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial berupa Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II dengan pemberi kerja / Bupati Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab penerima kerja. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Esselon II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	B

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
DINAS SOSIAL	7.060.074.228	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	241.609.100	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.132.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	29.132.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	212.477.100	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.952.100	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.595.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.194.500	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120.185.500	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8.550.000	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.699.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	5.699.000	

Desa/Kelurahan Asal Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.699.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	344.301.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	274.629.500
Penyediaan Perumahan	47.215.000
Penyediaan Sandang	3.696.500
Penyediaan Alat Bantu	51.820.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	65.619.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.613.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	43.221.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.038.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	1.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	29.407.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	69.671.500
Penyediaan Perumahan	5.310.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	53.805.500
10.556.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	300.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.180.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	122.820.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	97.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	334.569.500
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	234.492.500
Penyediaan Makanan	42.620.000
Penyediaan Sandang	53.226.200
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.242.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	71.296.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	29.108.300
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.077.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50.123.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	49.954.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	58.390.600

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	58.390.600
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.544.100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.822.500
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.024.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.775.505.028
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.439.749.156
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.749.156
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.614.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.600.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.031.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.983.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.015.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.001.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.366.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.292.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.017.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.278.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.059.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.256.472
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.008.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.430.536
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.330.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.487.936
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.117.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.117.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.752.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.752.500

2.4 RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan 2025-2026 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Sosial yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran. Untuk merealisasikan tahapan perencanaan tiga tahunan tersebut, Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini sebagai tonggak awal Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dari segi Target Capaian Kinerja dan Target Realisasi Anggaran di susun secara per triwulan sebagaimana yang tergambar dalam matriks berikut :

Tabel 2.4
Rencana Aksi Kinerja (RAK) Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Realisasi dan Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				TARGET REALISASI ANGGARAN				PENANGGUNG JAWAB		
				1 THN	TRIWULAN				1 THN	TRIWULAN				
					I	II	III	IV		I	II		III	IV
Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100%	20%	30%	30%	20%	5.775.505.028	1.155.101.006	1.732.651.508	1.732.651.508	1.155.101.006	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20%	30%	30%	20%	4.439.749.156	887.949.831	1.331.924.747	1.331.924.747	887.949.831	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / bulan	25	25	25	25	4.439.749.156	887.949.831	1.331.924.747	1.331.924.747	887.949.831	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20%	30%	30%	20%	37.600.000	7.520.000	11.280.000	11.280.000	7.520.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63 Paket	12	19	19	13	37.600.000	7.520.000	11.280.000	11.280.000	7.520.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20%	30%	30%	20%	71.014.000	14.202.800	21.304.200	21.304.200	14.202.800	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2	3	3	2	21.031.000	4.206.200	6.309.300	6.309.300	4.206.200	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	2	5	5	3	49.983.000	9.996.600	14.994.900	14.994.900	9.996.600	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20%	30%	30%	20%	406.015.400	81.203.080	121.804.620	121.804.620	81.203.080	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	1	0	1	8.001.400	1.600.280	2.400.420	2.400.420	1.600.280	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	1	84.366.600	16.873.320	25.309.980	25.309.980	16.873.320	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0	1	0	1	15.292.900	3.058.580	4.587.870	4.587.870	3.058.580	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	1	33.017.000	6.603.400	9.905.100	9.905.100	6.603.400	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	1	47.278.500	9.455.700	14.183.550	14.183.550	9.455.700	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	10	15	15	10	218.059.000	43.611.800	65.417.700	65.417.700	43.611.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	20%	30%	30%	20%	709.256.472	141.851.294	212.776.942	212.776.942	141.851.294			

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

			Daerah											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Laporan	170	255	255	17	8.008.000	1.601.600	2.402.400	2.402.400	1.601.600	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	0	0	0	81.430.536	16.286.107	24.429.161	24.429.161	16.286.107	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0	1	1	1	14.330.000	2.866.000	4.299.000	4.299.000	2.866.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	0	0	0	605.487.936	121.097.587	181.646.381	181.646.381	121.097.587	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	30%	30%	20%	111.870.000	22.374.000	33.561.000	33.561.000	22.374.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2	3	3	2	55.117.500	11.023.500	16.535.250	16.535.250	11.023.500	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1	1	1	1	56.752.500	11.350.500	17.025.750	17.025.750	11.350.500	
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	100%	20%	30%	30%	20%	241.609.100	48.321.820	72.482.730	72.482.730	48.321.820	Pemberdayaan Sosial
			2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	20%	30%	30%	20%		-	-	-	-	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100%	20%	30%	30%	20%	29.132.000	5.826.400	8.739.600	8.739.600	5.826.400	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	45 Dokumen	9	13	14	9	29.132.000	5.826.400	8.739.600	8.739.600	5.826.400	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang berkembang	100%	20%	30%	30%	20%	212.477.100	42.495.420	63.743.130	63.743.130	42.495.420	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2	3	3	2	26.952.100	5.390.420	8.085.630	8.085.630	5.390.420	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2	3	3	2	30.595.000	6.119.000	9.178.500	9.178.500	6.119.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	2 Keluarg	0	0	0	2	26.194.500	5.238.900	7.858.350	7.858.350	5.238.900	

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

	Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	a										
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga a	1	2	2	1	120.185.500	24.037.100	36.055.650	36.055.650	24.037.100	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	0	0	0	2	8.550.000	1.710.000	2.565.000	2.565.000	1.710.000	
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	20%	30%	30%	20%	5.699.000	1.139.800	1.709.700	1.709.700	1.139.800	Rehabilitasi Sosial
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100%	20%	30%	30%	20%	5.699.000	1.139.800	1.709.700	1.709.700	1.139.800	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Kabupaten Seruyan untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	3 Orang	0	1	1	1	5.699.000	1.139.800	1.709.700	1.709.700	1.139.800	
	Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sesuai SPM	100%	20%	30%	30%	20%	344.301.000	68.860.200	103.290.300	103.290.300	68.860.200	
		2. Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	20%	30%	30%	20%		-	-	-	-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	20%	30%	30%	20%	274.629.500	54.925.900	82.388.850	82.388.850	54.925.900	
		2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	20%	30%	30%	20%		-	-	-	-	
		3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	20%	30%	30%	20%		-	-	-	-	
		4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100%	20%	30%	30%	20%		-	-	-	-	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	140	28	42	42	28						

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

		Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					47.215.000	9.443.000	14.164.500	14.164.500	9.443.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	5	7	8	5	3.696.500	739.300	1.108.950	1.108.950	739.300
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4	6	6	4	51.820.000	10.364.000	15.546.000	15.546.000	10.364.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	4	7	7	5	65.619.000	13.123.800	19.685.700	19.685.700	13.123.800
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1	1	2	1	15.613.000	3.122.600	4.683.900	4.683.900	3.122.600
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2	3	3	2	43.221.000	8.644.200	12.966.300	12.966.300	8.644.200
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2	3	3	2	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1	1	2	1	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2	3	3	2	14.038.000	2.807.600	4.211.400	4.211.400	2.807.600
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1	1	2	1	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1	1	2	1	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	1	2	3	1	29.407.000	5.881.400	8.822.100	8.822.100	5.881.400
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	100%	20%	30%	30%	20%	69.671.500	13.934.300	20.901.450	20.901.450	13.934.300

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

	AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	di Luar Panti Sosial											
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10	15	15	10	5.310.000	1.062.000	1.593.000	1.593.000	1.062.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10	15	15	10	53.805.500	10.761.100	16.141.650	16.141.650	10.761.100	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	1	0	1	10.556.000	2.111.200	3.166.800	3.166.800	2.111.200	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota	100%	20%	30%	30%	20%	300.000.000	60.000.000	90.000.000	90.000.000	60.000.000	Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%	20%	30%	30%	20%	300.000.000	60.000.000	90.000.000	90.000.000	60.000.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	40.000 Orang	8000	12000	12000	8000	80.180.000	16.036.000	24.054.000	24.054.000	16.036.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat yang dikelola Kabupaten/Kota	22.432 Keluarga	4486	6729	6730	4487	122.820.000	24.564.000	36.846.000	36.846.000	24.564.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 Keluarga	2000	3000	3000	2000	97.000.000	19.400.000	29.100.000	29.100.000	19.400.000	
	Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	20%	30%	30%	20%	334.569.500	66.913.900	100.370.850	100.370.850	66.913.900	Penanganan Bencana
		2. Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab / Kota	100%	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1. Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	20%	30%	30%	20%	234.492.500	46.898.500	70.347.750	70.347.750	46.898.500	
		2. Persentase Korban Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20	30	30	20	42.620.000	8.524.000	12.786.000	12.786.000	8.524.000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	60 Orang	12	18	18	12	53.226.200	10.645.240	15.967.860	15.967.860	10.645.240	

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

		yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	2	3	3	2	38.242.000	7.648.400	11.472.600	11.472.600	7.648.400	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	20 Orang	4	6	6	4	71.296.000	14.259.200	21.388.800	21.388.800	14.259.200	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	100 Orang	20	30	30	20	29.108.300	5.821.660	8.732.490	8.732.490	5.821.660	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%	20%	30%	30%	20%	100.077.000	20.015.400	30.023.100	30.023.100	20.015.400	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Kampung	1	0	1	0	50.123.000	10.024.600	15.036.900	15.036.900	10.024.600	
	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	13	21	21	14	49.954.000	9.990.800	14.986.200	14.986.200	9.990.800	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100%	20%	30%	30%	20%	58.390.600	11.678.120	17.517.180	17.517.180	11.678.120	Pemberdayaan Sosial
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%	20%	30%	30%	20%	58.390.600	11.678.120	17.517.180	17.517.180	11.678.120	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	3 Dokumen	0	1	1	1	43.544.100	8.708.820	13.063.230	13.063.230	8.708.820	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	0	1	1	1	8.822.500	1.764.500	2.646.750	2.646.750	1.764.500	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Makam	0	1	1	1	6.024.000	1.204.800	1.807.200	1.807.200	1.204.800	
		Jumlah						7.060.074.228	1.412.014.846	2.118.022.268	2.118.022.268	1.412.014.846	


BAB III P E N U T U P

Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 ini merupakan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sebagai upaya untuk menyelenggarakan yang bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Selain itu Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari sasaran instalansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja merupakan komitmen bagi instalansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang rencanakan.

Rencana kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dimana suatu keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi dipokuskan pada aspek efisein yang dapat dicapai. Kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini, diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan,

ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001